

Jurnal
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian, kajian analitis kritis dan tinjauan buku dalam bidang sosial dan politik. ISSN 1410-4946

Pelindung:
Dekan Fisipol UGM

Ketua Penyunting
Purwo Santoso

Wakil Ketua Penyunting
I Gusti Ngurah Putra

Penyunting Pelaksana:
Abdul Gaffar Karim
Arie Sujito
Riza Noer Arfani
S. Djuni Prihatin
Subando Agus Margono

Penyunting Ahli
Moeljarto Tjokrowinoto
Ichlasul Amal
Sofian Effendi
Muhammad Amien Rais
Jahja Muhaimin
Afan Gaffar
Nasikun
Mohammad Mohtar Mas'ood
Bambang Setiawan
Ashadi Siregar
Susetiawan
Riswandha Imawan
Sugiono

Pelaksana Tata Usaha:
Novi Kurnia, Subari, Mukhrobin

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio-Justisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Telp./Fax: 0274 - 563362, e-mail: jsp@isipol.ugm.ac.id

Penyunting menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik diatas kertas HVS kuarto sekitar 3000-5000 kata dengan format seperti tercantum pada halaman kulit belakang (Persyaratan naskah untuk JSP). Naskah akan di 'review' oleh penyunting ahli. Hasil review bisa diketahui dalam jangka waktu 60 hari setelah naskah diterima.

DAFTAR ISI

Absennya Kajian Ekonomi Politik Media di Indonesia <i>Agus Sudibyo</i>	115-134
Ke Arah Studi "Etno-Media" <i>Akhmad Zaini Abar</i>	135-150
Media Massa dan Globalisasi Produk Simbolik <i>Pitra Narendra</i>	151-169
Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni <i>Ashadi Siregar</i>	171-196
Relasi Media-Negara-Masyarakat dan Pasar dalam Era Reformasi <i>Hermin Indah Wahyuni</i>	197-220
Kebebasan Pers Pasca Orde Baru <i>Susilastuti D. N.</i>	221-241

ABSENNYA PENDEKATAN EKONOMI POLITIK UNTUK STUDI MEDIA

Agus Sudibyo

Abstract

The rapid and deep changing of the media requires new approach in media studies in Indonesia. The currently predominating positivism is inadequate. The article advocates the use of a critical political economy as an alternative approach to study media in Indonesia.

Kata-kata kunci: *studi media, pendekatan ekonomi politik*

Media massa, terbukti menjadi faktor yang sangat determinan dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak dari jaman kolonial hingga jaman pasca Orde Baru saat ini, media memainkan peranan yang sangat penting dalam pergeseran-pergeseran sosial-politik yang terjadi. Namun, hingga saat ini masih sangat terasa betapa minimnya studi atau penelitian tentang media di Indonesia. Berbagai pihak mengeluhkan sedikitnya buku, monograf, makalah dan literatur lain yang menjelaskan perilaku, kecenderungan, peranan dan karakteristik media.

Dari yang sedikit ini pun, juga tidak selalu dapat menjelaskan dinamika yang terjadi dalam tubuh pers dari waktu ke waktu secara menyeluruh. Penelitian media di Indonesia sejauh ini hanya terpola pada pendekatan empiris-positivistik, terutama sekali yang bertumpu pada metodologi analisis isi kuantitatif untuk membedah teks media. Persoalannya bukanlah karena pendekatan atau metodologi ini sudah

Agus Sudibyo Penulis adalah Peneliti ISAI (Institut Studi Arus Informasi) Jakarta, anggota redaksi majalah *Pantau*, dan menulis buku *Politik Media dan Pertarungan Wacana*.

udzur dan tak berguna lagi, namun lebih karena tidak semua fenomena media mutakhir dapat dijelaskan dengan pendekatan itu. Dinamika kehidupan media dan pertautannya dengan kekuatan-kekuatan di luar dirinya bergerak begitu cepat, dan ini membutuhkan hadirnya pendekatan-pendekatan alternatif studi media. Fungsi pendekatan alternatif ini bukanlah untuk menggusur pendekatan positivistik-empiris, namun untuk saling melengkapi. Dalam kompleksitas problem media yang tercipta belakangan, kita dapat mengatakan bahwa ada fenomena atau realitas yang lebih tepat didekati dengan pendekatan empiris-positivistik, namun sebaliknya, ada fenomena atau realitas yang lebih tepat untuk didekati dengan pendekatan yang lain.

Tulisan ini membahas sebuah pendekatan yang selama ini jarang digunakan untuk menganalisis perilaku media di Indonesia, yaitu pendekatan kritis ekonomi-politik media. Setelah jatuhnya rejim Orde Baru, ada banyak realitas dan fenomena media yang justru lebih bermakna jika dijelaskan dengan pendekatan ekonomi politik ini. Terutama sekali realitas dan fenomena yang menunjukkan tarik-menarik yang dinamis antara kepentingan politik atau kepentingan modal dengan unsur-unsur di dalam media. Penyebarluasan gagasan tentang pendekatan ekonomi politik media ini, tentu saja membutuhkan instrumen. Tulisan ini mungkin dapat menjadi pancingan untuk diskusi lebih lanjut yang lebih produktif.

Antara Yang Empiris dan Yang Kritis

Dalam kurun waktu yang lama, studi ekonomi politik media yang bercorak kritis (*critical political economy of media*), absen dalam penelitian media di Indonesia. Sebagian besar, atau bahkan hampir semua, studi tentang media yang ada sejauh ini didasarkan pada pendekatan yang bertipe empiris-positivistik. Jarang sekali ada penelitian yang menggunakan pendekatan bertipe kritis.² Tipe

² Tinjauan umum tentang pendekatan empiris dan pendekatan kritis dalam studi media lihat misalnya dalam Everett M. Rogers, (1982), 'The Empirical and the Critical School of Communication Research,' dalam Michael Burgoon (ed), *Communication Yearbook*, Vol. 5, London, Transaction Books, hal. 125-143; Mengenai perkembangan studi kritis dalam media lihat Everett M. Rogers, (1994), *A History of Communication Study: A Biographical Approach*, New York, The Free Press, terutama hal. 102- 125

penelitian empiris, umumnya ditandai dengan pendekatan yang bercorak kuantifikasi, menggunakan teknik *sampling*, dan mengedepankan generalisasi. Ciri yang lain adalah penelitian empiris terutama sekali dilakukan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena media. Bentuk penelitian empiris ini ada bermacam-macam.

Dalam studi analisis isi, dikenal luas pemakaian analisis isi kuantitatif. Dalam studi institusi media, dikenal misalnya penelitian deskriptif untuk menggambarkan pola dan struktur organisasi. Sementara dalam penelitian efek media, banyak diterapkan studi mengenai efek media terhadap khalayak. Dengan pendekatan empiris, studi analisis isi akan mencoba melihat apakah sebuah media telah menampilkan liputan yang obyektif, netral, dua sisi dan tidak berpihak. Dengan kata lain, pendekatan empiris berasumsi bahwa obyektivitas, netralitas, ketidakberpihakan adalah suatu keniscayaan.

Hal ini mendapat kritik dari pendekatan kritis. Pendekatan kritis terhadap studi media dipengaruhi gagasan-gagasan Marxis yang melihat masyarakat sebagai suatu sistem kelas. Masyarakat dilihat sebagai suatu sistem dominasi, dan media adalah salah satu bagian dari sistem dominasi tersebut. Kalau pendekatan empiris cenderung meyakini bahwa kelompok-kelompok masyarakat dapat secara bebas bertarung dalam ruang yang terbuka, maka pendekatan kritis melihat masyarakat didominasi kelompok elit. Dalam hal ini, media adalah alat kelompok dominan untuk memanipulasi dan mengukuhkan kehadirannya sembari memarginalkan kelompok yang tidak dominan. Kalau pendekatan empiris percaya bahwa profesionalisme, sistem kerja, dan pembagian kerja dalam sebuah media dapat menciptakan kebenarannya sendiri, maka pendekatan kritis menolaknya. Wartawan yang bekerja dalam suatu sistem produksi berita tidaklah otonom, bukan pula bagian dari suatu sistem yang stabil, tetapi merupakan obyek dari praktek ketidakseimbangan dan dominasi. Pada titik inilah pendekatan kritis kemudian memperkenalkan dan mengampanyekan studi ekonomi-politik terhadap media.

Ada perbedaan lain antara pendekatan empiris dan pendekatan kritis. Dalam penelitian empiris, individu dipandang saling berkaitan dan akan mencapai keseimbangan. Peran penyeimbang ini diandaikan dapat diambil oleh media. Sebaliknya dalam tipe penelitian kritis, persoalan utamanya adalah media bukan berada dalam posisi

penyeimbang, sebab media dikuasai oleh kekuatan dan kelompok tertentu. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengontrol media dan mengapa? Apa keuntungan yang didapat dengan mengontrol media? Strategi apa yang digunakan untuk mengontrol media?

Penelitian yang bercorak kritis sangat peka terhadap praktek dominasi. Tindakan berkomunikasi dan menggunakan media dilihat sebagai sesuatu yang bertujuan, dan bukan semata-mata kegiatan netral untuk menyampaikan pesan kepada publik. Taruhlah dalam penelitian tentang komik Jepang. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian terutama untuk melihat apa isi komik Jepang, bagaimana tokoh-tokohnya, karakternya dan sebagainya. Isi komik dipandang sebagai sesuatu yang netral, "bebas" nilai.

Sebaliknya, dalam pendekatan kritis, komik dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan. Ada maksud terselubung di balik komik yang diproduksi dengan *style* atau karakter tertentu. Pendekatan kritis akan menunjukkan, misalnya saja, bagaimana melalui komik, Jepang berusaha mendominasi pendekatan khalayak pembacanya. Lewat komik, dipropagandakan gaya hidup, nilai dan norma masyarakat yang harus diterima oleh publik pembaca. Dalam hal ini, pendekatan kritis senantiasa meniscayakan adanya dua pihak dengan posisi yang tidak seimbang. Di satu sisi, ada pihak yang kuat dan mendominasi, di sisi lain ada pihak yang lemah dan terdominasi. Dominasi ini dapat berdimensi politik, ekonomi maupun dimensi yang lain.

Studi-studi dengan pendekatan kritis semacam inilah yang jarang dilakukan dalam khasanah studi media di Indonesia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beragam kemungkinan penyebab. Terutama sekali adalah karena dalam kurun waktu lama, pendekatan dalam studi komunikasi di Indonesia memang mengarah pada "mashab" *developmentalisme*. Ini tidak bisa dilepaskan dari ideologi politik yang dominan selama Orde Baru. Kreativitas mereka yang bergelut dalam dunia komunikasi terbelenggu ketika ranah komunikasi ternyata hanya dimaksudkan sebagai salah satu sekrup dari "mesin besar" pembangunan. Bidang-bidang komunikasi yang dikembangkan, karenanya hanya diambil bidang yang dipandang berguna untuk pembangunan. Demikian juga dengan studi-studi komunikasi yang digalakkan dan didukung secara kelembagaan. Dalam hal ini, studi-studi empiris-positivistik lebih mendapatkan tempat.

Sebaliknya studi-studi kritis, yang cenderung mempertanyakan keamanan dan mengkritik kekuasaan, bukan hanya tidak mendapatkan dukungan, namun juga dibatasi perkembangannya. Misalnya saja studi mengenai institusi media, sungguh jarang ditemukan selama Orde Baru. Dalam kurun waktu lama, yang banyak berkembang adalah penelitian mengenai aspek profesional, pola kerja, struktur organisasi, serta aliran tanggung-jawab dalam sebuah perusahaan media.

Demikian juga dengan studi yang mempertanyakan kepemilikan media, efek kepemilikan terhadap pemberitaan media, hubungan pemodal dengan awak media, pemodal dengan pemerintah tidak banyak mendapatkan tempat. Penelitian jenis ini sangat mungkin dipandang dapat menggoyahkan keamanan rejim. Selama Orde Baru, penelitian yang bercorak kritis dapat dengan mudahnya dicurigai sebagai kiri dan tidak sesuai untuk diajarkan di Indonesia. Ini juga berpengaruh dalam sistem pengajaran ilmu komunikasi di kampus-kampus. Infrastruktur pengajaran studi-studi media yang bercorak kritis tidak memadai, atau hampir-hampir tidak berkembang sama sekali. Tidak terdapat cukup buku, tulisan dan referensi lain tentang studi kritis media yang memadai. Lebih dari itu, para pengajar bidang studi ilmu Komunikasi juga banyak yang tidak *familiar* dengan pendekatan kritis dan literatur-literturnya. Mereka yang mendapatkan bea-siswa ke luar negeri, umumnya juga kuliah di universitas yang bertradisi empiris-positivistik.

Pendekatan dalam Studi Media

Sebelum masuk dalam pembahasan tentang pendekatan kritis ekonomi-politik media, ada baiknya dipetakan dulu pendekatan-pendekatan dalam studi media. Sejauh ini, paling tidak ada tiga pendekatan utama untuk menjelaskan media.³

³ Lihat Brian McNair, (1994), *News and Journalism in the UK: A Textbook*, London and New York, Routledge, terutama hal. 39-58. Lihat juga James Curran, Michael Gurevitch, dan Janet Woollacott, (1987), 'The Study of the Media. Theoretical Approaches' dalam Oliver Boyd Barret dan Peter Braham (ed), *Media, Knowledge, and Power*, London, Croom Helm, hal. 63-70

Pertama, pendekatan politik-ekonomi (*The political-economy approach*). Menurut pendekatan ini, isi media ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar media. Faktor seperti pemilik media, modal, iklan, regulasi pemerintah lebih menentukan bagaimana isi media. Penentuan di sini bisa mencakup peristiwa apa saja yang bisa atau tidak bisa ditampilkan dalam pemberitaan, atau ke arah mana kecenderungan pemberitaan itu hendak diarahkan. Dalam pendekatan ini, mekanisme produksi berita dilihat tidak ubahnya seperti relasi ekonomi dalam struktur produksi sebuah perusahaan bisnis. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai perusahaan media. Mengapa media memberitakan dengan cara seperti ini? Mengapa media hanya mewadahi suara pihak tertentu? Jawabannya dicari dengan melihat kepentingan ekonomi, kepemilikan media, atau kepentingan politik di balik sebuah media.⁴

Kedua, pendekatan organisasi (*organisational approaches*). Pendekatan ini bertolak belakang dengan pendekatan ekonomi politik. Dalam pendekatan ekonomi politik, media diasumsikan dipengaruhi kekuatan-kekuatan eksternal yang ada di luar diri pengelola media. Pengelola media dipandang bukan sebagai entitas yang aktif, sebaliknya pekerjaan mereka dibatasi oleh berbagai struktur yang mau tidak mau memaksanya untuk katakanlah memberitakan dengan cara tertentu. Pengelola media dipandang tidak bisa mengekspresikan pendekatan pribadinya. Sebaliknya, kekuatan eksternal di luar diri medialah yang menentukan apa yang seharusnya dikerjakan dan diberitakan.

Pendekatan organisasi justru melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukan dan produksi berita. Dalam pendekatan ini, berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme yang ada

⁴ Pendekatan ekonomi politik menolak asumsi teori *gatekeeper*. Dalam teori ini, proses produksi berita tidak lebih sebagai proses seleksi/penjaga gerbang: dari wartawan ke redaktur ke editor dan turun sebagai lapiran berita. Memang benar, mekanisme produksi berita penuh dengan proses seleksi semacam ini. Akan tetapi proses penyaringan dan seleksi ini tidak berlangsung dalam ruang hampa seperti layaknya dalam pendekatan *gatekeeper*. Penyaringan itu terjadi justru dengan memperhitungkan kekuatan-kekuatan ekonomi politik. Herman dan Chomsky (1988), misalnya menawarkan pendekatan yang mereka sebut sebagai model propaganda. Dalam model mereka, media dilihat sebagai agen yang mempropagandakan nilai-nilai tertentu untuk didesakkan kepada publik. Dalam model mereka, memang ada penyaring, tetapi penyaringan ini merepresentasikan kekuatan ekonomi politik yang ada dalam masyarakat.

dalam ruang redaksi. Praktek kerja, profesionalisme dan tata aturan yang ada dalam ruang organisasi adalah unsur-unsur dinamik yang mempengaruhi pemberitaan. Mengapa media memberitakan kasus A, mengapa kasus A diberitakan dengan cara tertentu, penjelasannya dilihat berdasarkan mekanisme yang terjadi dalam ruang redaksi. Mekanisme itu misalnya dalam hal penentuan nilai-nilai berita. Dalam hal ini, sebuah peristiwa diberitakan karena mempunyai nilai berita tertentu. Atau tokoh politik tertentu dikutip bukan karena mempunyai motivasi ekonomi dan politik, tetapi karena ia mempunyai nilai berita yang tinggi: artis, pejabat atau tokoh politik ternama lainnya. Dengan kata lain, proses produksi berita adalah mekanisme keredaksian, dimana setiap organisasi berita mempunyai pola dan mekanisme tersendiri untuk memberitakan suatu peristiwa. Mekanisme itu bersifat internal, bukan ditentukan oleh kekuatan di luar diri media. Media dianggap otonom dalam menentukan apa yang boleh, apa yang baik, apa yang layak dan tidak layak diberitakan.

Ketiga, pendekatan kulturalis (Culturalist Approach). Pendekatan ini juga dikenal sebagai *cultural studies*, dan merupakan gabungan antara pendekatan ekonomi politik dan pendekatan organisasi. Proses produksi berita dalam pendekatan kulturalis dilihat sebagai mekanisme yang rumit dan melibatkan faktor internal media (rutinitas organisasi) juga faktor eksternal di luar diri media. Mekanisme yang rumit itu ditunjukkan dengan melihat bagaimana perdebatan yang terjadi dalam ruang redaksi. Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar diri media.⁵

Varian Pendekatan Ekonomi Politik Media

Pendekatan ekonomi politik pada dasarnya mengaitkan aspek ekonomi (seperti kepemilikan dan pengendalian media), keterkaitan kepemimpinan dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media

⁵ Lihat misalnya dalam Brian McNair, (1995), *An Introduction to Political Communication*, London dan New York, Routledge, hal. 56-60

dengan industri lainnya, serta dengan elit politik, ekonomi dan sosial. Atau dalam bahasa Elliot, studi ekonomi politik media melihat bahwa isi dan maksud-maksud yang terkandung dalam pesan-pesan media ditentukan oleh dasar ekonomi dari organisasi media yang menghasilkannya. Organisasi media komersial harus memahami kebutuhan para pengiklan dan harus menghasilkan produk yang sanggup meraih pemirsa terbanyak.

Sedangkan institusi-institusi media yang dikendalikan institusi politik dominan atau oleh pemerintah, harus senantiasa mengacu kepada inti dari konsensus umum.⁶ Menurut Golding dan Murdock, pendekatan ekonomi politik mempunyai tiga karakteristik penting. *Pertama*, holistik, dalam arti pendekatan ekonomi politik melihat hubungan yang saling berkaitan antara berbagai faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di sekitar media dan berusaha melihat berbagai pengaruh dari beragam faktor ini. *Kedua*, historis, dalam artian analisis ekonomi politik mengaitkan posisi media dengan lingkungan global dan kapitalistik, dimana proses perubahan dan perkembangan konstelasi ekonomi merupakan hal yang terpenting untuk diamati. *Ketiga*, studi ekonomi politik juga berpegang pada falsafah materialisme, dalam arti mengacu pada hal-hal yang nyata dalam realitas kehidupan media.

Pendekatan ekonomi politik media dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu pendekatan ekonomi politik liberal (sebagai *mainstream*) dan pendekatan ekonomi politik kritis. Perbedaan prinsip antara pendekatan liberal dan kritis terletak pada bagaimana aspek ekonomi politik media itu dilihat. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktek profesional. Iklan, pemodal dilihat sebagai instrumen profesional dalam menerbitkan media. Sebaliknya, dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknai sebagai kontrol. Iklan dan pemodal bukan semata-mata dilihat sebagai bentuk kerja dan praktek profesional, tetapi iklan dan pemodal itu adalah instrumen pengontrol, melalui mana kelompok dominan memaksakan dominasinya kepada kelompok lain yang tidak dominan.

Struktur ekonomi media dalam pendekatan liberal juga semata

⁶ Dikutip dari James Curran, Michael Gurevitch, dan Janet Woollacott, (1987), 'The Study of the Media: Theoretical Approaches,' dalam Oliver Boyd Barret dan Peter Braham (ed), *Media, Knowledge, and Power*, London, Croom Helm, hal. 66

dilihat dalam kerangka profesional. Bagian iklan atau pemilik media adalah salah satu fungsi dari beragam fungsi dalam media. Sebaliknya dalam pendekatan kritis, beragamnya posisi dan ketidaksamaan posisi dalam sebuah organisasi media menyebabkan dominasi satu kelompok kepada kelompok lain. Bagian iklan atau pemilik media dapat menjadikan kekuasaannya untuk mendominasi pihak lain, misalnya untuk memaksa bagian redaksi agar memberitakan kasus-kasus yang menguntungkan pemilik media saja.⁷ Golding dan Murdock mengklasifikasikan perbedaan antara dua varian pendekatan ekonomi-politik media ini dari aspek *epistemology*, *historicity*, *issues* dan *focus* serta *concern*. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Epistemology	Liberal Political Economy	Critical Political Economy
Epistemology	Parsial: Ekonomi sebagai bidang yang terpisah dan khusus.	Holistic: faktor ekonomi, politik, sosial, dan budaya saling mempengaruhi.
Historicity	Analisis historis yang obyektif, terlepas dari waktu historis yang khusus dan tempat yang penting.	Analisis historis khususnya terfokus pada investigasi dan deskripsi terhadap kapitalisme modern.
Issues & Focus	Mekanisme dan struktur pasar di mana konsumen dipilih oleh dan dengan komoditi yang bersaing pada basis kegunaan dan kepuasan.	Kondisi-kondisi di mana aktivitas komunikasi terstruktur oleh realitas distribusi material dan sumber daya simbolik yang tidak seimbang.
Concern	• Efisiensi • Kedaulatan individu; dalam arti semakin kuat tekanan pasar, semakin besar kekuasaan konsumen untuk memilih.	• Keseimbangan antara perusahaan swasta dan intervensi (campur tangan) publik • Keadilan, kesetaraan, dan <i>public good</i>.

⁷ Lihat lebih lanjut dalam Mark Schulman (1990), 'Control Mechanism Inside the Media' dalam John Downing, Ali Muhammadi, Annabelle Sreberny-Mohammadi(ed), *Questioning the Media: A Critical Introduction*, London, Sage Publication, hal. 113-124

Pendekatan Ekonomi Politik Kritis

Fokus tulisan ini adalah pendekatan ekonomi politik yang bersifat kritis. Mengapa? Sekali lagi karena pendekatan yang bersifat kritis inilah yang belum banyak mendapat perhatian dari peneliti dan pengamat media di Indonesia. Analisis yang bersifat ekonomis terhadap media sebenarnya sudah sering dijumpai. Sebut misalnya analisis mengenai perolehan iklan atau pemetaan kepemilikan media. Namun perolehan iklan di sini masih dilihat dalam perspektif liberal. Iklan semata-mata dipandang sebagai bagian dari kinerja profesional kalangan media. Apa efek iklan terhadap pemberitaan, bagaimana pertarungan yang terjadi antara redaksi dan divisi iklan, belum banyak dipermasalahkan.

Pendekatan ekonomi politik yang bersifat kritis terbagi atas tiga varian, yaitu (1) *instrumentalism*; (2) *structuralism* (e.g. Schudson), dan (3) *constructivism* (e.g. Golding, Murdock).⁸ Perbedaan antara varian satu dan yang lain terletak pada ide-ide dasar untuk meninjau permasalahan ekonomi pasar dan keterkaitannya dengan lingkungan ekonomi, politik, dan budaya.

Pendekatan *instrumentalis* melihat elemen ekonomi sebagai faktor atau variabel yang determinan dan menentukan media. Faktor ekonomi itu digambarkan tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan faktor lain. Media dipandang sebagai instrumen dari dominasi kelas, dan kaum kapitalis menggunakan kekuasaan ekonomi dalam sistem pasar untuk memastikan arus informasi publik melalui media paralel dengan kepentingan dan minatnya. Dominasi itu digambarkan bersifat searah dan tanpa perlawanan. Faktor ekonomi dianggap menentukan secara langsung jalannya media. Apa yang tergambarkan dalam media mencerminkan kepentingan dan dominasi dari kelompok dan kekuatan ekonomi.⁹

Asumsi dasar dari pendekatan *instrumentalis* ini adalah, dalam alam kapitalistik, ekonomi menjadi faktor yang krusial. Media tidak bisa hidup tanpa disokong oleh ekonomi. Karena itu, proses bekerjanya

⁸ Lihat tinjauan umum mengenai varian pendekatan ekonomi politik ini pada Graham Murdock dan Peter Golding, (1979), 'Capitalism, Communication and Class Relation,' dalam James Curran, Michael Gurevitch dan Janet Woollacott (ed), *Mass Communication and Society*, Beverly Hills, Sage Publication, hal. 12-42

⁹ Salah satu tokoh penting dalam pendekatan *instrumentalis* ini adalah Edward S. Herman dan Noam Chomsky. Lewat bukunya, *Manufacturing Consent*, mereka melihat bagaimana

media ditentukan oleh kepentingan ekonomi. Sekedar contoh, sebut misalnya pemberitaan media dalam kasus demonstrasi buruh pabrik Gudang Garam beberapa waktu yang lalu. Mengapa media tidak begitu bersemangat memberitakan kasus demonstrasi buruh ini? Bahkan ada beberapa media yang sengaja sama sekali tidak memberitakan kasus mogoknya karyawan Gudang Garam karena menuntut kenaikan gaji. Dalam pendekatan instrumentalis, hal ini disebabkan oleh ketergantungan media pada pengiklan. Kebetulan Gudang Garam adalah salah satu penyumbang iklan terbesar bagi bisnis media. Media lebih memilih tidak memberitakan daripada memberitakan, daripada berakibat pada putusnya hubungan dengan pengiklan, yang berarti putusnya sumber ekonomi media. Dengan kata lain, keputusan untuk memberitakan suatu peristiwa ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Jadi, ciri penting dari pendekatan instrumentalis adalah sifatnya yang melihat faktor ekonomi sebagai satu-satunya faktor yang dominan dalam menentukan media. Perilaku dan tindakan media, digerakkan oleh kepentingan ekonomi politik yang pengaruhnya bersifat langsung dan searah.

isi media ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan ekonomi politik. Apa yang disajikan oleh media, bukan sesuatu yang netral, tetapi ditentukan oleh faktor besar yang berada di luar diri media dan wartawan. Semua faktor itu menentukan berita apa yang ditulis, dan kearah mana kecenderungan berita itu diarahkan. Menurut mereka, ketika memberitakan sesuatu, media pada dasarnya melakukan proses penyaringan, ia tidak bisa memberitakan begitu saja yang menjadi minat dan perhatian mereka. Proses saringan itu berjalan melalui lima tahap. *Pertama*, ukuran, kepemilikan, dan orientasi ekonomi dari media. *Kedua*, pengiklan. Apakah peristiwa itu berhubungan atau tidak dengan pengiklan, apakah berita yang ditulis bisa membuat pengiklan senang ataukah marah. *Ketiga*, sumber media massa. Orientasi pemberitaan juga ditentukan antara lain oleh sumber berita yang diwawancarai oleh media. Sejauh mana kedekatan media dengan sumber berita, sejauh mana susah atau sulitnya mencari akses informasi dan seterusnya. *Keempat*, apa yang disebut sebagai flak. komentar yang negatif yang umumnya berbentuk selebaran, telepon, petisi dan sebagainya yang bernada negatif terhadap suatu program. Ini merupakan penyaring yang keempat yang menentukan media. *Kelima*, mekanisme anti komunisme. Faktor ini sangat khas Amerika dan negara Barat. Dalam banyak pemberitaan mereka sangat alergi dengan pemberitaan yang berhubungan dengan komunisme, dan berita semacam ini umumnya mendapat saringan dari para redaktur. Apa inti dari gagasan Herman dan Chomsky? Media bukanlah kekuatan yang netral yang bisa menentukan agenda mereka sendiri. Sebaliknya apa yang tersaji di media pada dasarnya ditentukan oleh kekuatan ekonomi politik yang lebih besar di luar media. Kekuatan ekonomi politik itu yang memaksakan dan menentukan apa yang disajikan dan bagaimana orientasi pemberitaan media. Selengkapnya lihat Edward S. Herman dan Noam Chomsky (1988), *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, New York, Pantheon Books, terutama hal. 1-36

Pendekatan instrumentalis mengundang beberapa kritik. Pendekatan instrumentalis dianggap terlalu ekonomis dan reduksionis, mengabaikan elemen atau faktor lain di luar ranah ekonomi politik yang bisa jadi juga menentukan perilaku media. Faktor ekonomi memang penting dan dominan, namun tidak selalu bersifat determinan dan menjadi satu-satunya faktor yang berpengaruh. Kritik lain, dominasi kekuatan ekonomi atau politik dalam suatu media sebenarnya tidak selalu bersifat langsung dan searah. Jika kita menggunakan pendekatan instrumentalis, seakan-akan semua tindakan individu dan media betul-betul digerakkan semata oleh determinan ekonomi. Media sesungguhnya beroperasi dalam lingkup yang lebih rumit dan kompleks. Kritik terhadap pendekatan instrumentalis inilah yang kemudian melahirkan pendekatan konstruktivist.

Pendekatan konstruktivis melihat faktor ekonomi sebagai sistem yang belum sempurna, sehingga ekonomi media tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, namun juga oleh faktor lain seperti faktor budaya dan individu. Dalam pendekatan konstruktivis, negara dan kapital dipandang tidak selalu akan menggunakan media sebagai instrumen untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka. Sebab kepentingan ini beroperasi dalam struktur yang mengandung sejumlah fasilitas sekaligus pembatas, serta struktur yang mengandung sejumlah benturan kepentingan antar berbagai unsur yang saling bertarung. Pendekatan konstruktivis melihat dominasi kekuatan ekonomi atau politik tidak bersifat langsung, namun melalui proses yang rumit, dan melibatkan mekanisme pembenar dan hegemoni.

Sebut misalnya dalam kasus pemberitaan media atas pemogokan buruh Gudang Garam tadi. Mengapa media tidak memberitakan kasus ini, atau kalau pun memberitakannya dengan nada yang membela kepentingan Gudang Garam. Menurut pendekatan konstruktivis, hal ini bukan semata-mata karena Gudang Garam adalah pengiklan besar bagi media. Proses yang terjadi dalam internal media tidak sesederhana itu. Proses ini melibatkan politik pemaknaan, penandaan dan pemberitaan yang rumit. Ada proses hegemoni yang berlangsung panjang yang mensugestikan pabrik Gudang Garam sebagai perusahaan yang berjasa dalam menyerap tenaga kerja. Gudang Garam juga perusahaan yang banyak menyumbangkan pajak untuk

pembangunan pemerintah daerah. Pemogokan buruh, dalam konstruksi ini adalah tindakan orang yang tidak tahu diri, dan sengaja membikin keonaran. Sebab pemogokan itu praktis bisa membuat pabrik mengalami kerugian, sehingga pemerintah akan kehilangan sumber pendapatan berupa pajak dan retribusi. Pekerja lain yang tidak bisa bekerja juga dirugikan oleh sekelompok orang yang mogok.

Disini terlihat bahwa pemberitaan yang positif terhadap Gudang Garam melibatkan proses yang rumit, sebuah jalinan hegemoni yang berlangsung panjang dan lama. Pengaruh kekuatan ekonomi yang direpresentasikan oleh perusahaan besar semacam Gudang Garam, beroperasi dalam media tidak melulu lewat jalinan iklan, tetapi lewat proses pendefinisian yang hegemonik. Sebuah proses itu berlangsung lama, kontinyu dan tidak disadari, yang menegaskan betapa penting dan berpengaruhnya Gudang Garam bagi perekonomian rakyat, terutama di tingkat lokal Kediri dan sekitarnya. Konstruksi yang muncul dengan demikian adalah pemogokan buruh bukan hanya mengganggu proses produksi PT Gudang Garam, namun juga mengganggu ekonomi rakyat kecil yang hidupnya sangat tergantung pada Gudang Garam. Meskipun dalam pendekatan konstruktivis prosesnya berbeda, perhatiannya sesungguhnya sama dengan pendekatan instrumentalis: bagaimana media masih cenderung memberitakan dengan nada yang lebih positif kepada kekuatan ekonomi politik yang lebih dominan.

Baik pendekatan instrumentalis maupun konstruktivis melihat bagaimana faktor eksternal di luar diri media lebih menentukan perilaku media. Ternyata hal ini pada perkembangannya juga menimbulkan kritik tersendiri. Faktor internal, struktur dalam diri media adalah suatu mekanisme yang sangat rumit dan bergerak dinamis. Pemahaman ini kemudian melahirkan pendekatan strukturalis yang mencoba mengkritisi dua pendekatan yang terdahulu.

Pendekatan strukturalis lebih memfokuskan perhatiannya pada relasi dan pergulatan unsur-unsur dalam struktur internal media dengan faktor-faktor eksternal. Namun berbeda dengan pendekatan instrumentalis yang melihat struktur sebagai bentuk dinamis yang secara tetap direproduksi dan diubah melalui tindakan-tindakan praktis, pendekatan strukturalis lebih melihat struktur bersifat solid, permanen dan tidak dapat dipindahkan (*immovable*). Dalam pendekatan strukturalis, ekonomi politik media seharusnya merujuk

pada hasil-hasil proses pemberitaan yang berkaitan langsung dengan struktur ekonomi sebuah organisasi media. Dengan kata lain, pendekatan ekonomi politik media mesti mencakup aspek pertumbuhan media, peningkatan jumlah perusahaan, intervensi pemerintah, perubahan peran negara serta proses-proses akomodasi.

Pers Pasca Orde Baru: Sebuah Studi Kasus

Bagaimana pendekatan kritis ekonomi-politik media beroperasi, kita dapat melihatnya dengan mengambil contoh kasus dinamika pers Indonesia pasca Orde Baru. Penggunaan pendekatan kritis studi media mengandung konsekuensi bahwa kajian terhadap pers dan perubahan yang terjadi pada dirinya mesti dilakukan secara holistik. Pers harus dilihat sebagai entitas yang hidup dan berkembang dalam suatu *multi-layered structure*— struktur yang bertingkat dan saling mempengaruhi. Struktur organisasi media, struktur industri media, struktur ekonomi-politik Orde Baru, dan struktur kapitalisme global secara bergantian mempengaruhi eksistensi pers beserta produk-produk dan berbagai kecenderungan yang ditunjukkannya.

Pada titik ini, pers pertama-tama harus diletakkan dalam totalitas sosial yang lebih luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial dan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Ini berdasarkan asumsi bahwa teks isi media dan tindakan jurnalis dalam memproduksinya tidak terlepas dari konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengonsumsi teks, baik pada jenjang organisasi, industri dan masyarakat.

Jika kita menggunakan analisis instrumental, maka yang didapatkan adalah gambaran pers yang menjadi instrumen dominasi penguasa dan pemilik modal yang ternyata belum banyak mengalami perubahan dari era Orde Baru. Analisis semacam ini memang mampu mengungkapkan berbagai sisi kebenaran realitas pers dalam era Orde Baru, namun tidak akan pernah komprehensif. Selain itu, akan sulit pula menjelaskan bagaimana dinamika atau perubahan yang berlangsung dalam tubuh pers era Orde Baru ke era berikutnya.

Memang benar bahwa rejim Orde Baru mendominasi akses media, memiliki legalitas mengontrol media serta monopoli pemberian lisensi, dan di sisi lain para pemilik modal di sektor media memiliki

kekuasaan terhadap para pekerjanya. Namun penguasa atau pemilik modal, seperti halnya di industri media kapitalis pada umumnya, tidak selalu mampu sepenuhnya menggunakan media sebagai instrumen kekuasaan mereka karena struktur tempat mereka berada memuat sejumlah kontradiksi. Walaupun penguasa memiliki sumber daya rekayasa informasi untuk menciptakan citra tertentu bagi suatu kelompok, semua itu dilakukan dalam struktur yang memuat kendala-kendala bagi optimalisasi efektivitas komunikasi.

Jika analisis instrumentalis semata kurang komprehensif untuk membedah dinamika pers pasca Orde Baru, bagaimana dengan analisis strukturalis dan analisis konstruktivisme? Dinamika pers Orde Baru dan sesudahnya memang perlu pula dipahami sebagai bagian dari proses yang berlangsung dalam struktur politik otoritarian dan ekonomi kapitalis yang secara spesifik tercipta selama era Orde Baru. Struktur ekonomi-politik Orde Baru itu sendiri juga perlu diamati sebagai suatu entitas yang telah terintegrasi dalam jalinan struktur yang lebih makro, antara lain struktur finansial kapitalisme global.

Krisis ekonomi 1997-1998 yang pada akhirnya berujung pada "Revolusi Mei 1998" menunjukkan struktur finansial kapitalisme global itu dalam berbagai segi tidak terjangkau oleh intervensi agen pelaku sosial di tanah air, termasuk kalangan media. Tak pelak, teks pemberitaan media yang berkembang setelah itu, khususnya dalam proses-proses politik menjelang berakhirnya rejim Soeharto, juga tidak terlepas dari konteks ekspansi kapitalisme global, yang menghendaki liberalisasi ekonomi di negara-negara Dunia Ketiga. Sebuah tuntutan yang membuat perekonomian Indonesia tidak bisa menghindari campur tangan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *International Monetary Fund* (IMF) yang saat itu bisa disebut sebagai bangunan mekanisme sistemik liberalisasi ekonomi yang melawan sosialisme dan kapitalisme nasional, untuk mewujudkan perkembangan progresif kekuatan pasar internasional.¹⁰

¹⁰ Studi kasus ini dipinjam dari Dedy N Hidayat, (2000), 'Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial,' dalam Dedy N. Hidayat *et.al.*, *Pers dalam "Revolusi Mei", Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 431-447.

Namun bukan berarti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kapitalisme yang berkembang di Indonesia dan yang mempengaruhi kehidupan pers adalah struktur yang monolitik. Pada titik ini, mungkin kita perlu memperdebatkan hubungan antara struktur dan agensi. Perdebatan bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan: Di antara kondisi-kondisi pada level struktur ekonomi kapitalis di satu sisi, dengan tindakan agen-agen sosial seperti negara, pekerja pers dan pemilik modal di sisi lain, manakah yang lebih menentukan perkembangan dramatis dari pers Orde Baru menuju pers era sesudahnya?

Menjelang dan sesudah pergeseran politik Mei 1998, perubahan signifikans struktur ekonomi-politik pers Indonesia lebih merupakan hasil dari tindakan-tindakan para pekerja pers, atau lebih luas lagi produk interaksi antara penguasa, pemilik modal, dan pekerja pers. Perubahan politik-ekonomi yang terjadi membuat para pekerja pers memiliki kapasitas yang relatif lebih besar untuk melakukan tindakan-tindakan signifikans, sehingga teks isi media secara umum mengalami perubahan dramatis. Perubahan muatan pemberitaan media ini tak pelak turut memberikan kontribusi pada eskalasi atau akumulasi tekanan-tekanan terhadap stabilitas hegemoni penguasa dan kemapanan struktur politik otoritarian Orde Baru.

Namun, seperti dijelaskan Dedy Nur Hidayat, kapasitas agen pelaku sosial untuk mengubah struktur ekonomi-politik pers pada waktu itu diperoleh dalam kondisi di mana struktur politik otoritarian Orde Baru telah berubah cukup signifikans, akibat dari tindakan, gerakan, dan tekanan para agen pelaku sosial di lapis struktur lain. Pada titik ini, kita tak dapat mengesampingkan peran gerakan politik kelompok oposisi yang telah dimulai sejak jauh sebelum berlangsungnya krisis ekonomi 1997, gerakan mahasiswa dan LSM, kepanikan pemegang saham dan spekulasi valuta asing saat krisis ekonomi terjadi, tekanan-tekanan lembaga keuangan internasional, serta gelombang penjarahan yang terjadi di berbagai wilayah tanah air pada kerusuhan Mei 1998. Lebih jauh lagi, perubahan struktur ekonomi-politik pers Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi yang gagal ditanggulangi oleh rejim Orde Baru. Krisis dalam skala dan intensitas seperti itu merupakan suatu resiko struktural dalam kapitalisme global, yang pada titik historis spesifik masa itu telah

mencapai tahap elaborasi struktural tertentu, khususnya dari segi mobilitas dana internasional.¹¹

Bobot relatif dalam analisis hubungan kausal antara struktur dan agensi ditentukan oleh kondisi historis spesifik yang ada. Pemberian bobot relatif ini juga ditentukan oleh lapis struktur di mana kajian hubungan kausal antara struktur dan agensi tersebut dilakukan. Untuk konteks historis spesifik menjelang berakhirnya rejim Orde Baru, perubahan struktur industri pers dan struktur politik Orde Baru dapat diamati sebagai produk tindakan dan gerakan para agen pelaku sosial yang ada. Akan tetapi pergeseran itu tak pelak juga ditentukan oleh faktor-faktor struktural yang lebih makro, yang berkaitan dengan posisi struktural kapitalisme Orde Baru pada titik sejarah tertentu.

Pada titik ini, terlihat bahwa kita tidak bisa secara gegabah menyatakan bahwa pergeseran politik Mei 1998 dan dampak-dampaknya terhadap kehidupan pers lebih ditentukan oleh kondisi-kondisi struktur ekonomi kapitalis. Bobot relatif dari peranan struktur maupun agensi dalam hubungan kausal di antara keduanya ditentukan oleh kondisi historis spesifik yang melingkupinya. Dalam konteks historis tertentu struktur mungkin lebih menentukan agensi, sementara dalam konteks historis yang lain justru agensi yang akan menentukan perubahan struktur.

Dengan adanya fakta yang demikian ini, pers Orde Baru dan pasca Orde Baru sulit untuk dipahami hanya sekedar sebagai instrumen dominasi kelompok tertentu, atau sekedar representasi suatu struktur yang monolitik. Pers Orde Baru dan sesudahnya perlu diamati sebagai suatu arena pergulatan ideologis, di mana proses-proses hegemoni dan kontra-hegemoni, legitimasi dan delegitimasi berlangsung secara bersamaan.

Beberapa Studi Potensial

Perubahan-perubahan yang terjadi pada ranah media menjelang dan sesudah "revolusi Mei 1998" menyediakan banyak kasus yang sangat potensial untuk dikaji berdasarkan pendekatan kritis atau pendekatan ekonomi politik media. Kasus-kasus ini mestinya menarik

¹¹ Ibid., hlm. 442-443.

perhatian kalangan akademisi, praktisi dan pengamat media untuk memberikan sumbangsuhnya pada perkembangan khasanah studi media dan komunikasi khususnya, serta bagi khasanah studi isu-isu demokratisasi pada umumnya. Kasus-kasus tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

- UU Penyiaran. Ada banyak hal di seputar isu UU Penyiaran yang menarik untuk dikaji. Apakah pemerintah masih perlu turut-campur dalam mengatur isi media, iklan, kepemilikan media, saham asing, sampai pada soal pengaturan gelombang? Berbagai pihak, dari stasiun televisi swasta, organisasi penyiaran, LSM, organisasi jurnalis, serta pemerintah sendiri telah menyusun draft RUU Penyiaran sendiri dan menyerahkannya kepada DPR. Menariknya, terdapat perbedaan klausul-klausul yang terdapat pada masing-masing draft RUU. Apakah masing-masing draft menyiratkan kepentingan ekonomi atau politik tertentu? Adakah motif ekonomi tertentu di balik inisiatif stasiun televisi dan organisasi penyiaran untuk mengusulkan draft RUU Penyiaran tersendiri? Apakah akses dan sumber ekonomi dari kelompok-kelompok yang berada di balik RUU Penyiaran? Hal-hal inilah yang menjadi *concern* pendekatan ekonomi politik media. Disini, UU Penyiaran dilihat bukan sebagai aspek hukum atau aspek ideal, melainkan sebagai arena yang diperebutkan oleh beragam kepentingan dan kelompok. Kelompok itu datang dengan membawa agenda dan kepentingan mereka masing-masing untuk didesakkan dalam rancangan undang-undang yang kelak dapat menguntungkan mereka.
- Rantai Media: *MetroTV-Media Indonesia*. *Media Indonesia* dan *Metro TV* dimiliki oleh orang yang sama. Hubungan antara kedua media ini bukan semata-mata dalam kerangka bisnis atau profesional, namun juga dalam kerangka ekonomi politik. Pendekatan ekonomi politik akan melihat bagaimana pola kerjasama antar kedua media yang berbeda itu dilakukan. Apakah ada sumber dana yang diperebutkan antar keduanya, atau antara kedua media yang bersinergi ini dengan rantai media yang lain? Dengan kata lain, jaringan *Metro TV* dan *Media*

Indonesia dilihat dalam perspektif kepentingan ekonomi tertentu.

- **Televisi Swasta dan Keluarga Cendana.** Ini adalah isu lama yang masih tetap relevan untuk didekati dengan pendekatan ekonomi politik media. Sekali lagi yang ingin dilihat adalah apa pengaruh kepemilikan media terhadap isi atau arah pemberitaan media. Televisi swasta sebagai besar sahamnya hingga kini masih dimiliki keluarga Cendana dan orang-orang dekatnya. Pendekatan ekonomi politik akan melihat adakah pengaruh kepemilikan media ini masih berpengaruh signifikan terhadap isi pemberitaan, meskipun kondisi politik telah berubah sedemikian rupa. Apakah kepemilikan media itu mempengaruhi independensi dan pemberitaan televisi terhadap kasus-kasus yang melibatkan orang Cendana secara langsung maupun tak langsung? Kalaupun ada, bagaimana bentuk intervensi yang terjadi dan melalui cara-cara bagaimana intervensi itu dilakukan?
- **Studi Institusi di Ruang Pemberitaan: kasus redaksi *Tempo*.** Studi tentang ruang pemberitaan ini lebih melihat bagaimana konflik-konflik yang terjadi di ruang pemberitaan. Misalnya saja mengambil contoh kasus redaksi majalah *Tempo*. Akan diselidiki, bagaimana perbedaan kepentingan antara bagian redaksi, pemasaran, iklan dan pemilik modal terjadi dan mempengaruhi kinerja media? Bagaimana beragam kepentingan itu dinegosiasikan dan siapa yang biasanya akan menjadi pemenang? Dan masih banyak aspek lain.***

Daftar Pustaka

- Curran, James, Gurevitch, Michael, dan Woollacott, Janet (1987), 'The Study of the Media: Theoretical Approaches,' dalam Oliver Boyd Barret dan Peter Braham (ed), *Media, Knowledge, and Power*, London, Croom Helm, hal. 63-70.
- Herman, Edward S. dan Chomsky, Noam (1988), *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, New York, Pantheon Books, 1988.

- Hidayat, Dedy N. (2000), 'Jurnalis, Kepentingan Modal, dan Perubahan Sosial,' dalam Dedy N. Hidayat, Effendi Gazali, Harsono Suwardi dan Ishadi SK. (penyunting), *Pers dalam "Revolusi Mei", Runtuhnya Sebuah Hegemoni*, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 431-447.
- McNair, Brian (1994), *News and Journalism in the UK: A Textbook*, London and New York, Routledge.
- McNair, Brian (1995), *An Introduction to Political Communication*, London and New York, Routledge.
- Murdock, Graham dan Golding, Peter (1979), 'Capitalism, Communication and Class Relation,' dalam James Curran, Michael Gurevitch and Janet Woollacott (ed), *Mass Communication and Society*, Beverly Hills, Sage Publication, hal. 12-42.
- Rogers, Everett M. (1982), 'The Empirical and the Critical School of Communication Research,' dalam Michael Burgoon (ed), *Communication Yearbook*, Vol. 5, London, Transaction Books, hal. 125-143.
- Rogers, Everett M. (1994), *A History of Communication Study: A Biographical Approach*, New York, The Free Press.
- Schulman, Mark, (1990), 'Control Mechanism Inside the Media,' dalam John Downing, Ali Muhammadi, dan Annabelle Sreberny-Mohammadi(ed), *Questioning the Media: A Critical Introduction*, London, Sage Publication, hal.113-124.